

## **BAB III PERUMUSAN DAN PELUNCURAN EU NAVFOR**

Pada bab ini Penulis akan memberikan gambaran sekilas tentang Uni Eropa dan alasan ketertarikannya dalam masalah perompakan. Selain itu, penulis akan menjelaskan mengenai proses perumusan dan peluncuran operasi Eu Navfor dalam mengatasi masalah perompakan Somalia di Teluk Aden.

### **A. UNI EROPA**

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi yang terbentuk atas dasar-dasar kesepakatan bersama antar negara-negara di Eropa sebagai sebuah wadah federasi ekonomi dan politik di Benua Eropa. Pada awalnya Uni Eropa dibentuk pasca perang dunia II sebagai salah satu solusi terbaik untuk menghindarkan diri konflik dengan pengelolaan produksi batu bara dan baja secara bersama. Seiring berjalannya waktu, perkembangan Uni Eropa sebagai organisasi internasional menjukan kekuatan baru dalam dinamika percaturan ekonomi dan politik keamanan global.

Uni Eropa secara resmi didirikan pada tahun 1993 dengan penandatanganan perjanjian tentang Uni Eropa yang dikenal sebagai Maastricht Treaty. Perjanjian Maastricht Treaty dibuat pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1993 dimana negara-negara yang bergabung dalam anggota Uni Eropa memiliki peranan dalam memajukan kebijakan luar negeri secara signifikan yang telah dibuat untuk pengembangan Eropa. Negara-negara anggota dalam Uni Eropa terikat dengan serangkaian traktat yang telah disepakati dan ditandatangani kemudian di ratifikasi oleh masing-masing negara anggota atau dengan melalui referendum. Pemrakarsa Uni Eropa terdiri dari 6 negara dan keanggotaannya terus bertambah hingga saat ini telah menjadi 28 negara<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>[http://eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/documents/moreinfo/pub.2015\\_euataglance\\_id.pdf](http://eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/documents/moreinfo/pub.2015_euataglance_id.pdf). Hal. 1.

**Tabel 3.1: Negara Anggota Uni Eropa**

<b>Tahun Bergabung</b>	<b>Negara</b>
1958	Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luksemburg, Belanda
1973	Denmark, Irlandia, Inggris Raya
1981	Yunani
1986	Spanyol, Portugal
1995	Austria, Finlandia, Swedia
2004	Republik Ceko, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hongaria, Malta, Polandia, Slovenia, Slovakia
2007	Bulgaria, Rumania
2013	Kroasia

(Sumber: Eureka.eu)

## **1. Organisasi Uni Eropa**

Uni Eropa bukanlah sebuah Negara federal ataupun organisasi internasional dalam pengertian tradisional. Akan tetapi, merupakan sebuah badan otonom yang memiliki kombinasi diantara keduanya. Dalam bidang hukum istilah yang digunakan adalah 'organisasi supranasional'. Uni Eropa bersifat unik karena para Negara anggota tetap menjadi Negara berdaulat yang independen, meskipun mereka menggabungkan kedaulatan mereka untuk mendapatkan kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Dalam praktiknya, penggabungan kedaulatan berarti bahwa negara-negara anggota mendelegasikan sebahagian kekuasaan mereka dalam pengambilan keputusan kepada lembaga-lembaga bersama yang telah didirikan. Sehingga keputusan untuk masalah-masalah tertentu yang melibatkan kepentingan bersama dapat diambil secara demokratis pada tingkat Eropa<sup>2</sup>.

Terdapat beberapa lembaga dalam Uni Eropa yang menjalankan roda pemerintahan dan menjaga agar arah dan tujuan organisasi dapat dicapai. Adapun lembaga utama dalam

---

<sup>2</sup>*Ibid.* Hal. 2

Uni Eropa terdiri atas Parlemen Eropa yang dipilih secara langsung dan bertugas mewakili warga Negara Uni Eropa. Lembaga lainnya adalah dewan Uni Eropa sebagai badan legislatif yang merepresentasikan masing-masing Negara anggota dan Komisi Eropa yang menjalankan pemerintahan dan kepentingan Uni Eropa. Adapun lembaga lainnya yang juga memiliki peran penting dalam Uni Eropa adalah Mahkamah Uni Eropa dan Bank Sentral Eropa yang berfungsi memastikan dipatuhinya undang-undang yang telah disepakati bagi para Negara anggota dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa memiliki sejumlah lembaga dan badan antar-lembaga yang melaksanakan peran-peran khusus<sup>3</sup>.

**Gambar 3.1: Struktur lembaga Uni Eropa**



(Sumber: Eureka.eu)

Sejak didirikan, isu pembangunan ekonomi telah menjadi fokus domain kebijakan Uni Eropa. Terdapat berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Namun seiring dengan pembentukan Uni Eropa sebagai satu

<sup>3</sup>Ibid. Hal. 3-5

pemerintahan, maka Uni Eropa sekarang telah bertransformasi menjadi kesatuan politis yang tentu saja kebijakannya akan didasari pada kepentingan politik dari negara-negara anggotanya.

Kebijakan utama Uni Eropa berlandaskan pada 3 pilar utama. Dimana pengambilan kebijakan dilakukan oleh Komisi Eropa yang selanjutnya dibawa pada Parlemen Eropa dengan dilandasi kebutuhan ekonomi politik Uni Eropa sendiri.

Adapun 3 pilar tersebut yaitu: Pilar Komunitas Eropa, Pilar Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama, dan Pilar Kerjasama Kepolisian dan Kehakiman. Ketiga pilar inilah yang menjadi landasan kebijakan utama yang dikeluarkan dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap negara anggota. Kebijakan utama menunjukkan sebagai kebijakan yang dirancang untuk internal Uni Eropa. Namun, internalitas kebijakan-kebijakan Uni Eropa tidak terlepas nantinya dengan kebijakan eksternal Uni Eropa sebagai organisasi kerjasama internasional<sup>4</sup>.

Salah satu tujuan pendirian Uni Eropa adalah menjadikan Eropa sebagai kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dalam perdagangan global saat ini. Uni Eropa sebagai kesatuan ekonomi dinilai sebagai negara dengan pencapaian GDP yang lumayan bagus. Dalam Uni Eropa ada negara maju dan negara berkembang yang memiliki kepentingan ekonomi dan keadaan ekonomi yang jelas berbeda. Sehingga, penentuan kebijakan ekonomi akan mengalami ketimpangan dalam penerapan. Oleh karena itu, fungsi ekonomi dari Bank Sentral dan negara-negara penyokong dibutuhkan untuk mengkofer keadaan seperti ini. Dengan harapan mampu berkembang dengan baik dalam persatuan Uni Eropa yang merupakan satu kesatuan ekonomi dan politik bersama.

---

<sup>4</sup>[http://Tjes.blog.Kebijakan utama uni eropa.Pdf](http://Tjes.blog.Kebijakan%20utama%20uni%20eropa.Pdf). 2012.

Di mata dunia, Uni Eropa adalah kekuatan ekonomi yang berpengaruh besar terhadap pasar global setelah Amerika Serikat. Banyak hal yang dilakukan Uni Eropa sebagai kesatuan ekonomi dan politik, di antaranya dengan memberikan bantuan dana ke negara-negara berkembang dan negara-negara calon anggotanya. Dalam hal perpajakan dan bea cukai, negara-negara anggota Uni Eropa menetapkan satu tarif dan kesetaraan dalam perjanjian-perjanjian atau perundingan-perundingan internasional.

Selain bidang ekonomi dan politik, Uni Eropa melakukan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Walaupun belum tergolong negara *greatpower*, tetapi Uni Eropa bisa digolongkan sudah maju dalam bidang pertahanan dan keamanannya. Hal ini tercermin dari kerjasama dalam masalah-masalah kriminal, termasuk saling berbagi intelijen melalui EUROPOL, Sistem Informasi Schengen dan perjanjian tentang definisi bersama mengenai kejahatan dan prosedur-prosedur ekstradisi. Uni Eropa juga membentuk suatu kebijakan keamanan bersama sebagai suatu tujuan bersama, termasuk pembentukan Satuan Reaksi Cepat Eropa untuk menjaga perdamaian dunia, staf militer Uni Eropa dan sebuah pusat satelit Uni Eropa untuk kebutuhan intelijen atau pengintaian. Uni Eropa juga telah mengatur tentang kebijakan asylum dan imigrasi. Pembatasan jumlah imigran dan syarat-syarat menjadi warga negara Uni Eropa<sup>5</sup>.

Politik dan pertahanan keamanan memiliki korelasi yang cukup erat. Kemapanan pertahanan dan keamanan sebuah negara ataupun organisasi internasional seperti Uni Eropa berdampak terhadap pengaruh dan kekuatan dari kebijakan politik luar negeri yang diterapkan. Dalam konteks ini, negara-negara Eropa yang tergabung ke dalam NATO yang di satu sisi merasa terpinggirkan peranannya di dalam menentukan arah dan kebijakan strategi perang terutama yang menyangkut keamanan dan ketertiban daerah Balkan dan di sisi lain sudah tidak cocok lagi dengan dominasi Amerika Serikat melakukan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

satu bentuk resistensi dengan membentuk Pakta Pertahanan dan Keamanan di kawasan Uni Eropa.

Gagasan untuk memulai upaya pembentukan Pakta Pertahanan dan Keamanan di kawasan Uni Eropa dalam bentuk Independen dilakukan pada tahun 1998 di St. Malo Prancis dengan inisiasi dua Negara besar Inggris dan Prancis yang cukup memiliki pengaruh di Uni Eropa. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perdana menteri Inggris Tony Blair dan Presiden Prancis Chirac dan dianggap sebagai tonggak awal berdirinya *Common European Security and Defence Policy* (CESDP) yang kemudian berubah menjadi *European Security and Defence Policy* (ESDP) ditahun 1999<sup>6</sup>.

Pembentukan ESDP merupakan satu langkah maju dan salah satu upaya jitu dari Uni Eropa untuk memutus mata rantai supremasi pertahanan dan keamanan Amerika Serikat yang disimbolkan dengan NATO terutama dalam kaitan dengan pertahanan dan keamanan di daratan Eropa. Meskipun dalam beberapa kondisi Uni Eropa masih belum dapat sepenuhnya berdiri secara independen dari pengaruh NATO. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti sumber daya militer dan anggaran pertahanan, Uni Eropa yang belum begitu banyak dibanding kekuatan USA, dan lain-lain. Namun dalam sisi lain Uni Eropa punya prospek yang bagus untuk merealisasikan upaya pembangunan dimensi pertahanan dan keamanan.

Disamping upaya Pembangunan ESDP untuk memperkuat dukungan perencanaan dan misi strategis tempur dan strategi pertahanan dan keamanan, pembangunan aset-aset militer dilakukan agar dapat lebih mumpuni bertindak sebagai aktor internasional yang meyakinkan dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, kebulatan suara dan dukungan serta partisipasi antar negara-negara anggota Uni Eropa juga diperlukan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kekuatan diplomasi dan militer dalam kebijakan militer Uni Eropa.

---

<sup>6</sup>[http://BinaShifa.PerananUni Eropa Dalam Bidang Politik Keamanan dan Ketertiban Regional dan Internasional. 2016.](http://BinaShifa.PerananUni%20Eropa%20Dalam%20Bidang%20Politik%20Keamanan%20dan%20Ketertiban%20Regional%20dan%20Internasional.%202016.)

## **2. Alasan Keterlibatan Uni Eropa Mengatasi Masalah Perompakan Somalia.**

Somalia telah menjadi salah satu tempat paling tidak stabil di dunia sejak runtuhnya rezim diktator pada tahun 1991. Somalia merupakan negara yang tidak memiliki pemerintahan pusat yang efektif setidaknya selama lebih dari satu dekade terakhir. Somalia terdiri dari tiga wilayah berbeda dan populasi pribumi multi-suku yang setidaknya separuh dari mereka di bawah kondisi kemanusiaan terburuk. Dalam kondisi kemiskinan dan konflik yang berkepanjangan penduduk sulit untuk bertahan hidup dan membuat mereka dengan mudah terlibat dalam kegiatan perompakan.

Perompakan yang dilakukan oleh para bajak laut Somalia telah mengancam rute perdagangan utama internasional yang dimulai dari Terusan Suez hingga ke Teluk Aden. Ancaman perompakan membuat dunia Internasional mengambil sikap dalam mengatasi masalah ini. Sebab memecahkan masalah pembajakan di Teluk Aden membutuhkan lebih dari kehadiran beberapa lusin kapal. Kompleksitas masalah melebihi kapasitas sebagian besar negara individu dan karenanya harus ditangani dengan operasi multinasional dengan kekuatan dan kerjasama yang baik.

Kekhawatiran yang meningkat dari masalah perompakan dan keamanan maritim pada tahun 2008 membuat beberapa negara telah mengirimkan gugus tugas satuan militer masing-masing. Pasukan militer pertama dari Gabungan Gugus Tugas 150 beranggotakan 25 negara dan dipimpin oleh Amerika dengan markas pusat di Bahrain telah melakukan patroli bersama koalisi multinasional pada Agustus 2008. Tugas utama CTF 150 sebenarnya dalam rangka perang melawan terorisme di wilayah Tanduk Afrika (HOA). Namun meningkatnya aktivitas perompakan di seputar tanduk Afrika kemudian menambah peran lain dari satuan tugas ini dengan mendirikan daerah patroli keamanan maritim (MSPA) di Teluk Aden sebagai bentuk dukungan bagi operasi militer lain di laut Arab dan Samudra Hindia. Pada bulan Oktober 2008, Rusia bergabung dengan upaya antipirasi internasional di daerah tersebut dengan

kapal perang yang beroperasi secara berotasi. Sampai akhir tahun 2008 semakin banyak negara dan organisasi internasional yang turut ambil bagian dalam upaya mengatasi perompakan di Tanduk Afrika, diantaranya India, Malaysia, Arab Saudi, Iran dan Uni Eropa, dengan pengecualian Perancis yang menghadirkan kekuatan angkatan laut sendiri (ALINDIEN) di Djibouti sebagai perlindungan bagi kapal-kapal dagangnya<sup>7</sup>.

Keterlibatan Uni Eropa dalam upaya mengatasi masalah perompakan Somalia melalui operasi Atalanta terwujud pada 8 Desember 2008 dan secara resmi awal operasi dilaksanakan pada 13 Desember 2008. Operasi Atalanta dilaksanakan dengan mandat-mandat tertentu yang diberikan di bawah payung Uni Eropa. Misi Atalanta juga terbilang cukup unik arena merupakan langkah pengiriman angkatan laut pertama yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui CSDP. Langkah preventif militer dalam upaya mengamankan lalu lintas jalur perdagangan laut di Teluk Aden ini di inisiasi oleh sekurang-kurangnya enam negara Uni Eropa diantaranya Jerman, Swedia, Portugal, Prancis, Belanda dan juga Inggris menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam misi patroli dan pengamanan untuk mengantar kapal-kapal kargo, melindungi kapal komersial, dan mencegah pembajakan<sup>8</sup>.

Dengan kompleksitas dan kesulitan tersendiri mengingat ini adalah operasi pertama dari jenisnya dan berbagai macam tantangan yang dihadapi. Namun keterlibatan Uni Eropa melalui Atalanta menunjukkan ketertarikan yang cukup beralasan, mengingat nilai penting rute lalu-lintas maritim Teluk Aden dan dampak negatif yang ditimbulkan dari masalah perompakan bagi Uni Eropa sendiri. Berikut ini penulis akan mengklasifikasikan beberapa alasan mengapa Uni Eropa tertarik untuk turut secara langsung terlibat dalam mengatasi

---

<sup>7</sup>Evangelos Soufis.2012.Case Study of European Union Antipiracy Operation Naval Force Somalia Successes, Failures and Lessons Learned for the Hellenic Navy.Theses and Dissertations.Pdf.Hal. 8-9

<sup>8</sup><http://nasional.kompas.com/uni.eropa.turun.tangan.atasi.bajaklautsomalia.html>



masalah perompakan somalia yang semakin marak di Teluk Aden dan seputar perairan Tanduk Afrika.

a. Aspek Ekonomi

Wilayah perairan Teluk Aden menjadi sangat penting untuk perdagangan global karena berbagai alasan. Seperti yang diketahui, Teluk Aden merupakan jalur lalu-lintas perdagangan maritim global terpenting yang menghubungkan Asia dan Eropa. Teluk Aden yang terhubung dari Terusan Suez memainkan peran besar dalam arus pengiriman barang dalam perekonomian global. Selain itu, terdapat sekitar 11% minyak dunia diangkut oleh kapal-kapal tanker dari negara Teluk melalui wilayah perairan ini terutama untuk keperluan pasar Eropa dan Amerika. Teluk Aden bertanggung jawab atas 80% barang yang transit bagi pasar Eropa. Dengan letaknya yang strategis, jarak pengiriman dari Eropa ke Asia (efisiensi 23% Tokyo-Rotterdam) dan (88% Arab Saudi-Rotterdam) dapat lebih efektif dan lebih murah dibanding jika harus melewati jalur lain di Tanjung Afrika<sup>9</sup>.

Aksi perompakan di Teluk Aden yang mengganggu stabilitas keamanan dan berimplikasi pada terganggunya perdagangan internasional telah menimbulkan kerugian pada banyak negara di dunia. Beberapa diantaranya yang mengalami angka kerugian tertinggi dalam hal hilangnya potensi perdagangan termasuk Uni Eropa yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

---

<sup>9</sup>Fabian Stoffers. Protecting vital trade routes; The European Union's policy of combat of piracy in the Horn Of Africa from 2008-2012. Hal. 27.

**Tabel 3.2: Negara yang mengalami kerugian perdagangan**

Country	GDP (bilions)	Trade Via Suez (million)	Trade Share Via Suez (%)	Annual Loss in trade (%)	Annual Los as Share of Trade (%)	Fraction of Global Loss (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EU	12,997	557,763	0.04	10,937	0.08	44.01
China	2,860	102,000	0.17	2,000	0.03	8.05
Japan	4,590	66,600	0.13	1,306	0.260	5.26
UAE	2,870	59,000	0.46	1,157	0.89	4.66
India	884	58,400	0.40	1,45	0.76	4.61
USA	12,420	44,600	0.03	875	0.06	3.52
Korea Republic	782	33,500	0.13	657	0.24	2.64
Hongkong	186	30,200	0.10	592	0.20	2.38
Singapore	139	29,100	0.15	571	0.29	2.30
Australia	740	28,200	0.24	553	0.47	2.22
Turkey	466	23,000	0.22	551	0.42	1.81
Taiwan	323	18,400	0.14	361	0.26	1.45
Malaysia	151	14,900	0.14	292	0.27	1.18
Thailand	107	14,400	0,12	282	0,24	1.14
Czech Republic	135	12,200	0,16	239	0,30	0.96

(sumber : Eu Navfor Key Fact)

Berdasarkan data tersebut, Uni Eropa mengalami kerugian paling besar akibat dari adanya aksi perompak Somalia. Total nilai transaksi perdagangan Uni Eropa yang melewati Teluk Aden mencapai \$557,753 juta. Akibat dari adanya aksi perompak Somalia di Teluk Aden, Uni Eropa mengalami kerugian sampai dengan \$11 miliar yang setara dengan 44% dari total keseluruhan aksi perompak di dunia. Negara-negara anggota Uni Eropa seperti Jerman mengalami kerugian paling besar yakni mencapai \$2,5 miliar per tahun akibat dari aksi perompak Somalia, kemudian disusul oleh Inggris yang diperkirakan mengalami kerugian sampai dengan \$1,7 miliar per tahun,

negara Perancis diperkirakan mengalami kerugian sekitar \$1,3 miliar per tahun, sedangkan Italia, Spanyol, dan Belgia diperkirakan mengalami kerugian berkisar antara \$700 juta sampai dengan \$1 miliar per tahun<sup>10</sup>.

Biaya-biaya tersebut berasal dari berbagai macam hal termasuk peningkatan premi asuransi yang akan mempengaruhi penurunan perdagangan regional dan Internasional. Ditahun 2009 saja data menunjukkan bahwa biaya premi asuransi meningkat dari sekitar “US \$ 20.000 pada tahun 2008, menjadi US \$ 150.000” pada akhir tahun. Laporan lain dari otoritas terusan Zues mengindikasikan adanya penurunan dalam lalu lintas pengiriman dan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan dari aktivitas perdagangan akibat maraknya kasus perompakan. Jika pengiriman internasional terhambat untuk menyalurkan minyak dan ekspor gas di wilayah teluk, dikhawatirkan terjadi peningkatan komoditas dan harga energi dari Asia dan Timur Tengah yang diekspor Eropa dan Amerika<sup>11</sup>. Secara keseluruhan, analisis empiris menunjukkan kerugian tahunan yang diharapkan \$ 30.000.000.000 pada berbagai negara yang memanfaatkan Teluk Aden rute pengiriman. Dengan demikian, sangat penting bagi negara dan organisasi internasional untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk melawan perompakan maritim modern di Teluk Aden sebagai upaya pertaruhan menjaga stabilitas ekonomi global.

Maraknya aktivitas perompakan di Teluk Aden telah sangat mengganggu kepentingan perdagangan dan ekonomi Uni Eropa sebesar 80% yang menggantungkan aktivitas perdagangan maritim baik ke atau dari pelabuhan-pelabuhan negara anggota Uni Eropa melalui zona strategis Teluk Aden. Hal inilah yang menjadikan Uni Eropa memiliki alasan yang kuat untuk secara aktif terlibat dalam mengatasi perompak Somalia di Teluk Aden melalui operasi

---

<sup>10</sup>www.uregon.edu.com.International Expert Group on Piracy off the Somali Coast Report. 2009.

<sup>11</sup>*Ibid.* Hal. 9.

Atalanta demi melindungi jalur perdagangan yang sangat penting bagi perekonomian Uni Eropa.

b. Aspek Kemanusiaan

Situasi kemiskinan, kemarau berkepanjangan, kelaparan dan konflik antara klan yang melanda negara Somalia telah mengakibatkan Somalia menjadi salah satu tempat paling berbahaya di dunia dengan masalah kemanusiaan yang buruk. Kondisi kemanusiaan yang buruk membuat negara ini memerlukan suplay bantuan kemanusiaan dari *World Food Programme* (WFP) yang membawa pangan untuk sekitar 3,2 juta warga Somalia, dimana 43% dari populasi tergantung pada bantuan pangan. Sekitar 95% dari bantuan internasional yang disediakan ke Somalia dikirimkan melalui jalur laut. Kapal-kapal *World Food Programme* (WFP) mengangkut 30.000 sampai 40.000 metrik ton bantuan pangan per bulan untuk Negara dibagian Tanduk Afrika ini<sup>12</sup>.

Menurut Satuan Analisis Keamanan Pangan dan Gizi (FSNAU) dan Sistem Jaringan Peringatan Awal Kelaparan untuk Somalia telah memantau kondisi bencana kelaparan yang melanda negara ini. Terdapat lebih dari 2,3 juta orang yang terdampak dalam krisis yang melanda di seluruh Somalia pada tahun 2012. Ketahanan pangan dan gizi yang rapuh disebabkan oleh musim kering berkepanjangan, konflik sipil bersenjata, serta ketidakstabilan politik dan keamanan terus berkontribusi terhadap sulitnya mendapatkan akses pangan rumah tangga miskin. Sementara upaya bantuan distribusi WFP terhadap populasi penduduk dalam krisis kelaparan pada elemen paling rentan yaitu perempuan dan anak tidak berjalan maksimal akibat ancaman aksi perompakan<sup>13</sup>.

Perompakan di lepas pantai Somalia menurut International Maritime Organization (IMO) dari tahun 2000 merupakan ancaman bagi pelayaran internasional. Sejak

---

<sup>12</sup>Op.Cit. 9Maritime\_piracy Hal. 196.

<sup>13</sup>www.Eunavfor.Eu. World Food Programme.pdf. 2012 hal. 6.

tahun 2005 organisasi IMO dan World Food Programme (WFP) menyatakan keprihatinan mereka atas munculnya pembajakan karena pembajakan telah menghalangi pengiriman pengiriman bantuan makanan. 90% dari bantuan WFP tiba melalui laut dan pengiriman menjadi sangat rentan karena kapal-kapal yang digunakan tidak cukup besar dan berkecepatan rendah yang memudahkan serangan pembajakan dapat dengan mudah dilakukan. Oleh karena itu, WFP membutuhkan pengawalan militer sebagai perlindungan dalam menyuplai bantuan pangan.

Sebagai bentuk keprihatinan Uni Eropa terhadap masalah kemanusiaan di Tanduk Afrika, Uni Eropa meluncurkan Operasi mengatasi perompakan yang salah satu mandat pentingnya adalah memberikan bantuan pengawalan militer pada kapal-kapal penyuplai bantuan pangan WFP. Namun sebelum itu, beberapa negara anggota Uni Eropa telah lebih dahulu berkontribusi dalam menangani bencana kemanusiaan yang melanda Somalia. Tak kurang dari Inggris, Prancis dan Jerman yang cukup serius menganggapi masalah ini.

Pemerintah Prancis dibawah kepemimpinan Sarkozy secara aktif mencari solusi untuk meningkatkan dukungan pemberian bantuan kemanusiaan ke Somalia melalui WFP. Pada tanggal 25 September, setelah menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, Presiden Sarkozy mengumumkan bahwa 'Prancis siap untuk mengirim kapal perang' untuk menjamin keamanan konvoi WFP dengan memberikan pengawalan angkatan laut untuk jangka waktu dua bulan dan memanggil semua negara yang ingin melakukannya untuk bergabung dengan inisiatif yang sama. Direktur Executive WFP Sheeran mengatakan bahwa angkatan laut akan 'mengurangi ancaman pembajakan dan memungkinkan WFP untuk memberi makan pada lebih banyak penduduk yang dilanda kelaparan di Somalia. Setelah Operasimulai mengawal kapal WFP-kontrak, semua pengiriman bantuan makanan mampu mencapai pelabuhan-pelabuhan Somalia tanpa dibajak oleh perompak Somalia. Program pengawalan Prancis yang

kemudian dikenal sebagai Operasi “Alcyon” dinyatakan beroperasi pada tanggal 16 November dan dilakukan selama dua bulan pertama operasi yang kemudian dilanjutkan secara bersama oleh Belanda, Jerman dan Kanada yang juga sementarawaktu diambil alih oleh NATO pada bulan Oktober 2008 lalu kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam pasukan angkatan laut Uni Eropa pada bulan Desember<sup>14</sup>.

Sebagai bagian dari Uni Eropa, Jerman juga mengikuti perkembangan situasi kemanusiaan yang makin memburuk di Somalia. Kunjungan Kanselir Angela Merkel ke Ethiopia, Afrika Selatan dan Liberia banyak membawa pesan mengenai bencana kemanusiaan yang melanda rakyat di kawasan Tanduk Afrika. Jerman bahkan menawarkan semua bantuan yang bisa dikerahkan untuk membantu menemukan solusi politik atas konflik yang berkepanjangan. Keseriusan negara Jerman dalam perhatiannya membantu rakyat Somalia terlihat dari peningkatan bantuan kemanusiaan yang diberikan pada bulan November 2008<sup>15</sup>.

Untuk meringankan penderitaan kemanusiaan dan menghentikan penyebaran kelaparan yang dialami penduduk Somalia, pemerintah Inggris telah memberikan kontribusi sejumlah besar bantuan kemanusiaan ke Somalia melalui Pemerintah Federal Transisi (TFG). Pada tahun 2007 saja, Inggris menyumbangkan sekitar £ 8,7 juta untuk berbagai operasi kemanusiaan di seluruh negara bermasalah. Jumlah ini termasuk £ 600.000 untuk program gizi UNICEF di Somalia selatan dan £ 466.000 untuk organisasi non-pemerintah Médecins du Monde untuk intervensi kesehatan dan gizi<sup>16</sup>. Dengan kata lain, pemerintah Inggris sangat terlibat dalam mendukung Somalia dan TFG.

---

<sup>14</sup>Niklas Novaky. Deploying Military Force Under CSDP: The case of UE Navfor Atalanta. UACES Annual Conference 2012. Hal. 9-10.

<sup>15</sup>*Ibid.* Hal.11.

<sup>16</sup>*Ibid.* Hal.13.

### c. Aspek Keamanan

Keterlibatan Uni Eropa dalam upaya mengatasi masalah perompakan Somalia melalui operasi “Atalanta” juga tak bisa dilepaskan dari aspek kepentingan keamanan negara-negara anggota Uni Eropa Sendiri. Perompakan Somalia yang semakin marak terjadi di beberapa dekade terakhir telah menimbulkan ancaman keamanan yang nyata bagi stabilitas keamanan rute lalu-lintas pelayaran maritim di Teluk Aden baik dalam lingkup regional dan bahkan internasional. Mengingat tingginya intensitas serangan perompakan dan sekaligus penyanderaan terhadap awak kapal yang berhasil ditahan oleh para perompak, ancaman keamanan terhadap para pelaut tentu jadi perhatian lain yang pantas dipertimbangkan. Menurut data yang disatir dari laporan Reuters selama periode tahun 2007-2011, terdapat lebih dari 3.500 sandera yang berhasil ditawan. 62 orang diantaranya meninggal dunia dikarenakan berbagai faktor, seperti dibunuh atau bunuh diri, sakit dan kekurangan gizi dan yang berhasil dirilis juga mengalami trauma berat. Menurut laporan lain, 57% dari sandera juga menghadapi perlakuan buruk di tangan perompak 26% dari sandera mengalami pelecehan, sedangkan 43% digunakan sebagai perisai manusia<sup>17</sup>. Prancis adalah salah satu negara Uni Eropa dimana 22 warga negaranya pernah dibajak dalam insiden *Le Ponant* oleh para perompak Somalia pada 4 April 2008<sup>18</sup>.

Selain ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh masalah perompakan berupa penyanderaan yang berpotensi menimpa para pelaut, ancaman lain yang dapat ditimbulkan dari instabilitas politik dan pemerintahan di Somalia adalah tentang terorisme dan perdagangan senjata ilegal yang berpotensi mengancam keamanan dunia internasional. Negara seputar wilayah Tanduk Afrika yang tidak memiliki pemerintahan dan kekuatan negara yang efektif merupakan

---

<sup>17</sup>[https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Pressemitteilungen/afrika/2007/10/07\\_1004\\_01.html](https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Pressemitteilungen/afrika/2007/10/07_1004_01.html)

<sup>18</sup>Opcit.Novaky.Hal. 15.

tempat yang sangat mendukung bagi perkembangan terorisme. Perang sipil antar klan di Somalia juga makin diperkeruh dengan keterlibatan organisasi teroris Al-Shabab yang terafiliasi dengan Al-Qaeda. Dalam beberapa kasus, Al-Shabab berusaha mengganggu pembangunan kembali pemerintahan transisi federal (TFG) dengan aksi-aksi terorisme dan radikalisme. Menteri luar negeri Inggris (Miliband) mengatakan bahwa kehadiran kelompok teroris di Somalia dapat mengancam keamanan global dan juga keamanan nasional negara Inggris yang dikenal menjadi rumah bagi sejumlah imigran ekstrimis asal Afrika Timur<sup>19</sup>. Di tahun 2015, terdapat sekitar 137.000 orang pengungsi yang bermigrasi karena kondisi perang, konflik dan kelaparan yang melintasi Laut Mediterania menuju Eropa untuk mencari suaka. Para imigran tersebut berasal dari negara konflik seperti Irak, Sudan, Nigeria dan termasuk juga Somalia<sup>20</sup>.

Beberapa negara anggota Uni Eropa yang sebelumnya tergabung dalam koalisi multinasional Operasi Keamanan Maritim (MSO) seperti Prancis, Inggris, Belanda, Portugal, Spanyol dan Inggris dibawah gabungan gugus tugas CTF 150 (Operation Enduring Freedom) untuk melawan tindakan terorisme dan kegiatan ilegal terkait yang digunakan teroris untuk mendanai atau mengembangkan gerakan mereka turut aktif dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di wilayah Teluk Aden dan seputar Tanduk Afrika<sup>21</sup>. Dengan adanya wadah baru Operasi Eu Navfor yang merupakan bagian dari CSDP Uni Eropa. Tentu akan memberi peluang yang lebih besar dalam mengatasi masalah perompakan Somalia sekaligus mengamankan kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara anggota Uni Eropa.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> <http://www.satuharapan.com-imigran-menuju-eropa-dalam-6-bulan.Rabu.1.Juli.2015.html>.

<sup>21</sup> <https://combinedmaritimeforces.ctf-150-maritime-security.html>



## **B. PERUMUSAN, PELUNCURAN DAN PELAKSANAAN OPERASI EU NAVFOR**

Berkaitan dengan dampak perampokan bersenjata di Teluk Aden dan di seputar perairan lepas pantai Somalia yang berdampak buruk bagi perdagangan internasional, keamanan maritim dan kegiatan ekonomi serta keamanan negara di wilayah ini. Uni Eropa sebagai salah satu aktor internasional yang konsen pada masalah ini dan sekaligus mengalami dampak kerugian yang cukup besar kemudian mengambil langkah strategis sebagai bagian dari pendekatan komprehensif pada wilayah di seputar Tanduk Afrika. Akhirnya, pada tanggal 8 Desember 2008 Uni Eropa meluncurkan *European Union Naval Force Somalia* (EU NAVFOR) atau dengan nama lain Operasi Atalanta. Dengan fungsi untuk mengawal kapal dari Program Pangan Dunia (WFP) yang bertugas menyuplai bantuan pangan untuk pengungsi di Somalia. Selain itu, tugas lainnya dilakukan untuk melindungi jalur pelayaran yang rentan di Teluk Aden dan lepas pantai Somalia dan melakukan pencegahan terhadap aksi perompakan.

Tindakan ini merupakan bagian dari kerangka Keamanan Umum dan Kebijakan Pertahanan Eropa (CSDP) yang relevan dengan Resolusi Dewan Keamanan (UNSCR) dan Hukum internasional. Operasi Atalanta juga merupakan operasi angkatan laut pertama yang dilaksanakan oleh Uni Eropa sebagai bentuk kampanye untuk masyarakat internasional dalam melawan perompak Somalia yang telah tumbuh menjadi masalah keamanan internasional.

Sebelum mendeskripsikan lebih jauh mengenai operasi Atalanta dalam Mengatasi Perompakan di Teluk Aden, penulis terlebih dahulu akan menggambarkan bagaimana proses perencanaan, perumusan dan peluncuran Eu Navfor.

### **1. Proses Perencanaan Dan Perumusan EU Navfor**

Pembajakan maritim di sekitar Tanduk Afrika dan terutama di perairan Teluk Aden dan lepas pantai Somalia telah menjadi masalah keamanan internasional selama beberapa dekade terakhir, khususnya di periode tahun 2000-an. Perkembangan negatif masalah ini menyebabkan

dikeluarkannya seruan oleh masyarakat internasional untuk melakukan sesuatu dalam menangani masalah ini. Pada bulan November 2005, Organisasi Maritim Internasional PBB menghimbau agar semua pihak yang mungkin dapat membantu untuk mengambil tindakan guna memastikan bahwa semua serangan perompakan di masa depan terhadap setiap kapal yang melintas di perairan tersebut dapat dicegah. Empat bulan kemudian pada Maret 2006, Presiden Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan yang mendorong negara-negara yang memiliki aset dan pesawat angkatan laut di dekat pantai Somalia untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mewaspadai setiap insiden perompakan<sup>22</sup>.

Pada tanggal 5 Juli 2007, Sekretaris Jenderal IMO (Efthimios E. Mitropoulos) dan Direktur Eksekutif WFP (Josette Sheeran) mengeluarkan komunike bersama di London yang menyerukan adanya aksi internasional secara terpadu dan terkordinasi untuk mengatasi ancaman perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal di perairan lepas pantai Somalia. Peringatan ditujukan pada masyarakat internasional bahwa perompak Somalia mengancam jalur laut di wilayah Teluk Aden<sup>23</sup>. Perompak juga mengancam suplai jalur rentan pengiriman bantuan pangan bagi penduduk Somalia yang hidupnya telah hancur selama lebih dari 15 tahun akibat konflik sipil berkepanjangan, ketidakstabilan politik dan bencana alam.

Sekretaris Jenderal Ban Kimoon, juga telah menyatakan keprihatinan atas keselamatan kegiatan pengiriman WFP. Dewan Keamanan PBB yang menekankan keprihatinannya atas situasi ini kemudian mengeluarkan Resolusi 1772 pada tanggal 20 Agustus 2007<sup>24</sup>. Hal ini menjadikan tekanan meningkat pada masyarakat internasional untuk mengambil tindakan dalam

---

<sup>22</sup>Niklas Novaky. Deploying Military Force Under CSDP: The case of UE Navfor Atalanta. UACES Annual Conference 2012. Hal. 7.

<sup>23</sup>*Ibid.* Hal. 8.

<sup>24</sup>*Ibid.* Hal. 9.

menjamin keamanan konvoi WFP ke Somalia. Tindakan pencegahan aksi perompakan dilakukan sejalan dengan hukum internasional yang relevan. Seruan ini kemudian meningkatkan perhatian masyarakat internasional terhadap masalah pembajakan di seputar wilayah Teluk Aden dan lepas pantai Somalia.

Mengingat urgensi masalah keamanan yang dihadapi oleh WFP dalam melaksanakan kegiatan suplai pangan untuk bantuan kemanusiaan di jalur perairan yang rawan ini, berbagai aktor internasional kemudian terpanggil untuk turut berpartisipasi dalam pengawalan dan perlindungan terhadap kapal-kapal WFP yang melibatkan unsur militer. Beberapa diantaranya termasuk negara-negara anggota Uni Eropa seperti Prancis, Inggris dan Jerman. Keterlibatan Negara-negara ini kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya operasi EU Navfor.

a) Perancis

Setelah terpilih sebagai Presiden Prancis pada bulan Mei 2007, Nicolas Sarkozy mulai meningkatkan perhatian terhadap masalah perompakan Somalia di wilayah Tanduk Afrika. Pemerintah baru Sarkozy secara aktif berupaya mencari cara untuk meningkatkan pemberian bantuan kemanusiaan ke Somalia dan meningkatkan kampanye anti-pembajakan pada masyarakat internasional yang semakin mengkhawatirkan karena meningkatnya jumlah serangan perompakan. Pada titik ini Prancis melihat adanya ancaman keselamatan pada WFP yang bertugas menyuplai bantuan pangan bagi masalah kemanusiaan di Somalia. Perancis seperti banyak negara lain, yakin bahwa mengurangi perompakan adalah kunci untuk memfasilitasi pengiriman bantuan makanan dan bantuan kemanusiaan lainnya ke Somalia, karena sebagian besar bantuan WFP diangkut melalui laut<sup>25</sup>.

Inisiatif Perancis untuk melindungi kapal-kapal WFP kemudian terwujud dalam sebuah Operasi Alcyon yang di

---

<sup>25</sup>*Ibid.* Hal. 9.

operasionalkan pada tanggal 16 November 2007. Perancis siap untuk menjamin keamanan konvoi WFP dengan memberikan pengawalan angkatan laut untuk mencapai pelabuhan Somalia tanpa dibajak oleh para perompak dan memanggil semua negara yang ingin melakukannya untuk bergabung dalam inisiatif ini. Operasi kemudian dilanjutkan ke Denmark, Belanda, Jerman, Kanada lalu diambil alih oleh NATO pada bulan Oktober 2008 dan kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam pasukan angkatan laut Uni Eropa pada bulan Desember<sup>26</sup>.

Pada bulan April 2008 Paris menganjurkan kehadiran angkatan laut yang lebih besar melalui mandat PBB di Tanduk Afrika yang dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas maritim internasional. Sikap ini disebabkan terjadinya pembajakan yang menimpa kapal pesiar mewah 'Le Ponant' yang berbendera Prancis saat di serang oleh sekelompok perompak Somalia di Teluk Aden dalam perjalanan ke Terusan Suez. Insiden penyerangan sekelompok perompak Somalia dianggap telah mengancam keselamatan dan keamanan warga negara Perancis. Dewan Keamanan PBB kemudian mengadopsi hal tersebut dengan merilis resolusi 1816 pada 3 Juni 2008<sup>27</sup>.

Sejalan dengan upaya di Dewan Keamanan PBB, pemerintah Perancis telah mulai mempertimbangkan solusi bekerjasama untuk masalah pembajakan Somalia melalui saluran Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengeluarkan ekspresi keprihatinan formal atas pertumbuhan pembajakan maritim di wilayah Teluk Aden dan lepas pantai Somalia dalam kesimpulan GAERC dari pada 26-27 Mei<sup>28</sup>. Negara Anggota memutuskan tugas Komisi Eropa dan Sekretariat Dewan Umum untuk bisa ambil bagian dalam kampanye masyarakat internasional terhadap masalah perompakan. Tujuan utamanya untuk

---

<sup>26</sup>*Ibid. Hal. 10.*

<sup>27</sup>*Ibid. Hal. 15.*

<sup>28</sup>Council of the European Union. 'General Affairs and External Relations', (Belgium ; 29 April 2008) Hal. 15.

mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan yang luas, termasuk kemungkinan memberikan pelatihan penjaga pantai Somalia dan Yaman. Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa proses penyebaran operasi angkatan laut Uni Eropa untuk pertama kali telah diarahkan pada sebuah upaya operasi militer anti perompakan.

Pada tanggal 10 Juli, Perwakilan Tinggi CFSP ‘Javier Solana’ mempresentasikan upaya yang menjelaskan beberapa pilihan kebijakan yang sangat luas, mulai dari penyebaran operasi CSDP secara penuh untuk pembentukan koalisi yang bersedia berpartisipasi dalam masalah ini. Dewan Sekretariat Jenderal Uni Eropa menganggap bahwa pilihan yang paling mungkin diambil adalah penyebaran kapal perang yang akan menempuh rute yang ditetapkan dan pada waktu yang ditetapkan untuk memberikan perlindungan bagi setiap kapal swasta yang ingin bergabung secara sukarela. Selain itu, kekuatan politik kuat yang mendorong Uni Eropa memilih opsi CSDP berasal dari Perancis dan Spanyol yang tertarik untuk mengambil gugus tugas dan dukungan terhadap angkatan laut CSDP yang bisa terlibat dalam operasi anti-perompakan di perairan Teluk Aden dan Samudera Hindia<sup>29</sup>.

Dalam proses perencanaan militer standar Uni Eropa, Manajemen Konsep Krisis (CMC) biasanya diadopsi sebagai langkah pertama menuju penyebaran operasi. Tujuannya CMC adalah untuk melayani kerangka konseptual yang menguraikan pendekatan dasar Uni Eropa dan tujuan politik dalam kaitannya dengan situasi tertentu, yang dalam hal ini adalah pembajakan di lepas pantai Somalia dan di Teluk Aden. Pada pertengahan Juli, Staf Militer (EUMS) telah mengajukan draft CMC kepada Komite Militer Uni Eropa (EUMC) untuk ditinjau. Dokumen yang diadopsi menekankan bahwa tujuan politik Uni Eropa dalam memerangi pembajakan Somalia harus ‘untuk berkontribusi dalam peningkatan keamanan maritim

---

<sup>29</sup>*Ibid. Hal. 21.*

di kawasan strategis daerah sekitar Tanduk Afrika untuk perdagangan internasional dan transportasi minyak dari negara-negara di Teluk Persia. Dengan kata lain, ini adalah fondasi dimana perencanaan militer lebih lanjut akan dibangun.

Setelah CMC diadopsi oleh Dewan, Menteri Luar Negeri Uni Eropa di General Affairs Council membuat dua keputusan penting: pertama, memutuskan untuk mendirikan sebuah *EU Naval Coordination* (EU NAVCO) dan tindakan kedua sepakat pada *Military Strategic Option* (MSO) untuk kekuatan angkatan laut Uni Eropa. Sehubungan dengan keputusan pertama, EU NAVCO adalah mekanismeyang didirikan untuk mengkoordinasikan negara anggota Uni Eropa untuk berkontribusi dalam operasi anti-pembajakan di Tanduk Afrika. Tugas utama dari tindakan koordinasi Uni Eropa untuk mendukung kegiatan pengawasan dan perlindungan yang dilakukan oleh beberapa Negara Anggota di lepas pantai Somalia. Pada awalnya, oprasi ini terdiri dari dua kapal perang, satu dari Perancis dan lainnya dari Spanyol, serta pesawat pengintai maritim P-3 Orion yang disediakan oleh Spanyol, ditambah sel koordinasi terletak dalam Sekretariat Dewan Jenderal. Namun, EU NAVCO tidak langsung mengendalikan aset militer sendiri, juga tidak memiliki Kantor Pusat Operasional. Bahkan setelah EU NAVCO beroperasi, negara-negara anggota terus sepenuhnya bertanggung jawab atas kapal mereka sendiri<sup>30</sup>. Selanjutnya, Dewan Uni Eropa kemudian memutuskan untuk meluncurkan operasi angkatan laut penuh CSDP, lalu EU NAVCO akan dihentikan dan kegiatan diambil alih oleh Kantor Pusat Operasional baru EU NAVFOR.

Setelah disepakati bahwa kekuatan angkatan laut CSDP akan diperintahkandari Northwood Inggris, Menteri Luar Negeri Uni Eropa dalam pertemuan di Dewan Umum sepakat untuk membentuk kerangka hukum EU NAVFOR dengan mengadopsi Joint Action 2008/851/CFSP. Untuk

---

<sup>30</sup>*Ibid. Hal. 23.*

Aksi Bersama, Sekretariat Jenderal Dewan juga telah memperkirakan bahwa biaya operasional. Negara-negara Anggota harus menyumbang secara bersama melalui mekanisme Athena dengan jumlah taksiran sekitar € 8.300.000 untuk 12 bulan pertama operasi. Sekretariat Jenderal Dewan memperkirakan bahwa operasi akan membutuhkan setidaknya tiga kapal setiap saat: satu untuk mengawal konvoi WFP, yang lain untuk mengawal kapal-kapal komersial di Teluk Aden, dan sisanya untuk surveilans dari daerah operasi, khususnya daerah nelayan yang dianggap penting<sup>31</sup>.

Meskipun pengawalan terhadap WFP yang di tujuan operasi ini guna memberikan kesan bahwa motivasi dan pertimbangan kemanusiaan menjadi pilihan, namun jelas bahwa tujuan-tujuan tersebut bukan menjadi alasan utama. Prioritas lain dari operasi adalah untuk melindungi kepentingan negara anggota Uni Eropa yang paling terpengaruh oleh perompakan di Tanduk Afrika. Urgensi melindungi rute pelayaran strategis penting di Teluk Aden karena perdagangan eksternal Eropa sangat bergantung pada perjalanan yang aman melalui choke point jalur penting ini. Teluk Aden juga merupakan kawasan berbahaya bagi pelaut Eropa yang paling terkena dampak langsung dari perompakan, seperti dalam kasus pembajakan *Le Ponant*. Selain itu, Spanyol telah mendorong Uni Eropa untuk melindungi kapal-kapal nelayan di Samudera Hindia, yang telah menjadi sasaran mudah bagi perompak Somalia. Sikap ini ditujukan untuk melindungi armada kapal pemancing Spanyol yang dikenal kerap terlibat dalam illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Somalia. Dengan demikian, operasi Atlanta dengan mandat khusus memang dirancang dengan prioritas

---

<sup>31</sup>Mission EU. 'EU Preparing for Piracy Mission, No Plan for Captured Pirates', (Brussels; 17 November 2008)

utama untuk melindungi kepentingan negara anggota Uni Eropa<sup>32</sup>.

Pada tanggal 8 Desember, General Affairs Council memberi lampu hijau untuk penyebaran EU NAVFOR dengan mengadopsi Keputusan Dewan 2008/918/ CFSP. Setelah perencanaan Proses yang menyita waktu enam bulan EU NAVFOR akhirnya diluncurkan. Penyebaran yang sukses dan relatif cepat dari operasi Atalanta sebagai operasi angkatan laut Uni Eropa untuk pertama kalinya merupakan kemenangan politik bagi Uni secara keseluruhan, terutama untuk Perancis yang memiliki inisiatif kuat dalam mengatasi masalah perompakan dikawasan Tanduk Afrika.

b) Jerman

Seperti halnya Negara lainnya, Pemerintah Jerman juga telah mengambil langkah secara domestik melalui Operasi Enduring Freedom dibawah kontingen NATO terkait Perang global melawan Terorisme. Tugas utamanya adalah untuk mencegah teroris mendapatkan akses ke jalur laut strategis penting di Tanduk Afrika. Selain itu, Jerman tergabung juga dalam operasi CTF-150 guna mengurangi tindakan perompakan dengan mengirimkan kapal Augsburg 213 kelas Bremen Frigate beserta 224 awak yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Namun, kebijakan tersebut tak banyak memberi dampak yang efektif. Hal ini dikarenakan lemahnya aturan mengenai kepastian jaminan hukum dalam tindakan anti perompakan yang diakomodasi oleh pemerintah Jerman<sup>33</sup>.

Setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 1816, Departemen Pertahan Jerman mulai berinisiatif dalam kampanye masyarakat internasional terhadap masalah perompakan Somalia. Kebijakan ini mengarahkan pada adanya peningkatan kemampuan bagi angkatan laut Jerman. Bersamaan dengan itu, PSC Uni Eropa juga

---

<sup>32</sup> Op.Cit. Hal. 24.

<sup>33</sup>Niklas Novaky. Op.Cit. Hal. 11-12



memulai diskusi tentang kontribusi yang dapat diberikan oleh Uni Eropa terhadap pelaksanaan resolusi 1816. Dewan Uni Eropa mendirikan kerangka hukum EU NAVFOR dengan mengadopsi asas aksi bersama. Langkah ini memberikan solusi atas permasalahan konstitusional untuk memungkinkan pemerintah Jerman untuk mulai mengajukan mandat dari Bundestag untuk memberikan izin yang diperlukan pada partisipasi negara dalam operasi anti-perompakan di wilayah Tanduk Afrika. Mandat yang diajukan diharapkan seefektif mungkin untuk memberikan Angkatan Laut Jerman kekuasaan yang diperlukan dalam melindungi rute pelayaran strategis penting di Teluk Aden dan Samudera Hindia Somalia.

Pada 10 Desember, setelah melalui proses selama sebulan, mandat kemudian dikirim ke Bundestag untuk dibahas dan disetujui 9 hari berikutnya. Mayoritas anggota Deputi Bundestag akhirnya menyetujui partisipasi Jerman untuk terlibat langsung dalam operasi Atalanta. Pemerintah Jerman melalui Menteri Pertahanan Jung berjanji menyumbangkan satu kapal frigat F 212 Karlsruhe dengan 200 awak tentara elit Kampfschwimmer yang sangat terlatih, ditambah dengan 2 helikopter jenis Sea Lynx Mk.88A untuk Misi Atalanta<sup>34</sup>. Dalam draf mandat, pemerintah Jerman mengatur 1.400 pasukan kontingen tentara, meskipun tidak berarti bahwa 1.400 tentara Jerman akan dikerahkan langsung secara bersamaan di wilayah Tanduk Afrika untuk memerangi perompakan. Sedangkan perkiraan biaya keuangan dari penyebaran ini untuk 12 bulan pertama operasi mencapai sekitar € 45 juta yang diambil dari kas Negara. Dengan kata lain, pemerintah Jerman ingin agar operasi dapat dilakukan dengan melihat tingkat fleksibilitas dan kebutuhan dalam pelaksanaan operasi. Jerman bahkan menarik sementara kapal perang dari operasi SNMG-2 NATO dan CTF-150 USA untuk menempatkannya di bawah kendali misi Atalanta.

---

<sup>34</sup>Niklas Novaky. Op.Cit. Hal. 33

Pengaturan kebijakan ini tentu akan meningkatkan jumlah kapal yang bisa digunakan melawan perompak Somalia<sup>35</sup>.

Dukungan kuat Jerman untuk operasi anti perompakan EU Navfor di Teluk Aden tentu sangat beralasan, mengingat kepentingan ekonomi Jerman yang sangat besar dalam perdagangan internasional, dimana ada sekitar 80% total arus perdagangan diangkut melalui jalur laut. Jerman memiliki minat yang kuat dalam melindungi lalu lintas maritim di kawasan Tanduk Afrika karena banyak kapal-kapal mereka yang melewati kawasan tersebut baik milik perusahaan pelayaran Jerman atau transportasi kargo dari dan tujuan Jerman. Sebagai ekonomi terbesar Eropa dan eksportir terbesar di dunia, Jerman memiliki kepentingan ekonomi penting yang dipertaruhkan jika pembajakan di Tanduk Afrika terus menyebar<sup>36</sup>. Dengan demikian, Jerman tidak menghindari dari menyatakan pembajakan yang merupakan ancaman langsung ke kepentingan ekonominya. Selain itu, alasan kemanusiaan untuk melindungi konvoi kapal pengirim bantuan pangan WFP bagi penduduk Somalia dan negara-negara Afrika yang mengalami masalah kelaparan menjadi inisiatif tersendiri bagi Jerman untuk tergabung dalam Misi EU Navfor.

c) Inggris

Seperti kebanyakan mitranya di Eropa, Inggris juga telah mengikuti perkembangan perang sipil yang menghancurkan negara Somalia. Sebagai negara yang telah menjadi rumah bagi komunitas besar imigran dan pengungsi dari Somalia, kekhawatiran Inggris tertuju pada situasi kemanusiaan yang terus memburuk pada penduduk Somalia. Adanya kelompok Teroris Seperti Al-shahab yang terafiliasi dengan Al-Qaeda sangat berpotensi mengancam keamanan nasional Inggris, karena Inggris dikenal sebagai salah satu negara di Eropa yang menjadi rumah bagi sejumlah kecil ekstrimis dari kawasan Afrika Timur<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup>Niklas Novaky. Op.Cit. Hal. 34

<sup>36</sup>Niklas Novaky. Op.Cit. Hal. 34

<sup>37</sup>Niklas Novaky. Op.Cit. Hal. 13.

Dengan demikian, Inggris berusaha membantu TFG untuk menegaskan kendali atas wilayah tak berpemerintahan di negara itu terkait dengan tujuan yang lebih luas dalam Perang Melawan Teror.

Pada tahun 2007 saja, Inggris telah mengeluarkan dana sekitar £ 8,7 juta untuk berbagai operasi kemanusiaan di seluruh negara bermasalah termasuk di Somalia dalam upaya membangun stabilitas politik dan pemerintahan oleh TFG. Jumlah tersebut termasuk £ 600.000 untuk program gizi UNICEF di Somalia selatan dan £ 466.000 untuk organisasi non-pemerintah Médecins du Monde untuk intervensi kesehatan dan gizi. Selain memberikan bantuan kemanusiaan, pemerintah Inggris juga terlibat dalam memerangi terorisme di Tanduk Afrika melalui partisipasi Royal Navy dalam CFT-150 dan Operasi Enduring Freedom<sup>38</sup>.

Masalah terkait pembajakan maritim untuk pertama kalinya mulai dibahas dalam Strategi Keamanan Inggris Pada awal tahun 2008. Ekses dari pembahasan tersebut membuat Inggris berkomitmen kuat dalam upaya multilateral dalam bingkai hukum guna melindungi kegiatan ekonomi, dari berbagai segi termasuk serangan elektronik, pencucian uang dan terhadap gangguan keamanan dari serangan perompak di Teluk Aden<sup>39</sup>. Alasan dimuatnya Strategi keamanan Inggris karena maraknya kasus perompakan di Teluk Aden yang juga menimpa beberapa warga negara Inggris sendiri. Salah satu kasus perompakan yang pernah menimpa seorang Kapten kapal asal Inggris<sup>40</sup>. Selain itu, seruan dari Dewan Keamanan PBB melalui resolusi 1816 mengenai kampanye melawan pembajakan maritim memaksa Inggris untuk

---

<sup>38</sup>Associated Press. 'Britain proposes UN peace effort operate within Somalia', (24 April 2008)

<sup>39</sup>Niklas Novaky. Op.Cit. Hal. 20.

<sup>40</sup>The Guardian. 'British captain held for 46 days by Somali pirates freed with his crew', (London,UK; 19 March 2008).

meningkatkan kontribusi sumber daya yang dimiliki untuk terlibat secara lebih luas.

Pada saat Uni Eropa mulai merencanakan untuk membangun kekuatan angkatan laut CSDP untuk memerangi perompak Somalia, posisi resmi pemerintah Inggris sedang bekerja dengan mitra Uni Eropa guna mempertimbangkan penyebaran kapal angkatan laut untuk melindungi konvoi pengiriman WFP ke Somalia. Namun, nampaknya inisiatif Inggris tidak sekuat Perancis yang mendorong maju ide meluncurkan operasi CSDP. Hal ini dikarenakan NATO dan Armada AS sudah hadir di Teluk Aden dan Samudera Hindia. Alasan di balik pemikiran Inggris adalah bahwa kapal WFP sudah dilindungi untuk mengirim bantuan ke Somalia. Namun, menjelang akhir September di kurun 2008 Inggris mulai memahami perlunya mengadopsi sikap yang lebih kuat, karena beberapa negara anggota termasuk Jerman terus menekankan bahwa mereka membutuhkan operasi CSDP dengan mandat khusus untuk melawan perompak Somalia dan memberikan aset angkatan laut tambahan<sup>41</sup>.

Adopsi kebijakan Inggris dengan pendekatan yang lebih positif terhadap penyebaran CSDP yang diusulkan menjadi jelas terlihat pada pertemuan informal Menteri Pertahanan Uni Eropa di Deauville. Menteri Pertahanan Des Browne suggested menatakan bahwa Inggris bersedia untuk mempertimbangkan berpartisipasi dalam operasi angkatan laut Uni Eropa. Menteri dari departemen pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani pembajakan maritim disekitar Tanduk Afrika memutuskan bahwa Inggris harus mengambil sikap yang lebih proaktif terhadap masalah ini. Inggris bersedia untuk memimpin komando oprasi dari Markas multinasional di Northwood dan menunjuk Laksamana Philip Jones sebagai Komandan Operasi yang pertama<sup>42</sup>. Kebijakan ini dianggap efektif dengan asumsi

---

<sup>41</sup>Niklas Novaky. *Op.Cit.* Hal. 20-21.

<sup>42</sup>The Irish Times. 'EU agrees on mission to combat piracy', (Deauville, France; 03 October 2008).

peran komando Eu Navfor akan bisa berguna sebagai titik kontak antara NATO dan Uni Eropa, dimana sebelumnya wakil komandan orpasi NATO juga dijabat oleh militer London. Inggris ingin memastikan kerjasama yang maksimal antara pasukan Uni Eropa dan upaya-upaya anti-pembajakan yang sudah dikerahkan di sekitar Tanduk Afrika. Kerjasama EU Navfor dengan CTF-150 dan SNMG-2 akan membangun serangkaian saluran komunikasi informasi antara satu sama lain dengan harapan bahwa saluran ini akan mudah membuat koordinasi taktis setelah EU Navfor mulai melaksanakan oprasinya. Selain itu, didapat juga persetujuan pengangkatan Yunani sebagai negara pertama untuk memerintah Atalanta Force Headquarters dengan regulasi pergantian kedudukan pos yang diubah setiap 3 bulan<sup>43</sup>. Hal ini ditujukan untuk memastikan misi terintegrasi dalam jangka panjang dan bersifat kontinyu.

Dalam proses partisipasi pasukan Atalanta, pemerintah Inggris menegaskan bahwa mereka akan memberikan kontribusi satu kapal HMS Northumberland, Tipe 23 frigate, yang sebelumnya melekat CTF-150 untuk permulaan operasi. Sebagai penyebaran pertama kalinya, angkatan laut Uni Eropa mulai melaksanakan mandatnya tanggal 8 Desember 2008. Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri Inggris menekankan pentingnya operasi untuk perlindungan perdagangan internasional dari ancaman yang sangat serius<sup>44</sup>. Mengingat tingginya jumlah kapal yang disandera oleh perompak Somalia mengkhawatirkan ketidakamanan saat pengiriman barang yang dampaknya berimbas pada kerugian perdagangan global. Dengan kata lain, pemerintah Inggris melihat bahwa peluncuran Oprasi Atalanta juga melindungi kepentingan ekonomi Inggris sendiri.

---

<sup>43</sup>Niklas Novaky. Op.Cit. Hal. 36-37

<sup>44</sup>The Guardian. 'Armada against Somali pirates is EU's first naval operation', (London, UK; 8 December 2008).

## 2. Peluncuran Operasi EU Navfor

Keterlibatan Uni Eropa sebagai upaya mengatasi perompakan Somalia terwujud dalam sebuah pengiriman armada angkatan laut melalui operasi patroli dan pengamanan pada tanggal 8 Desember 2008 yang diberi nama EU NAVFOR (European Union Naval Force Somalia) dengan nama sandi operasi “Atalanta”. Kebijakan ini berdasar pada EU Council Joint Action 2008/851 dan EU Council Decision 2008/918. Operasi EU Navfor resmi diluncurkan melalui Menteri Luar Negeri Uni Eropa dalam rapat Dewan Umum setelah mendapat persetujuan dari Dewan Uni Eropa dalam rangka Keamanan Bersama Eropa dan Kebijakan Pertahanan (CSDP) dan sesuai dengan mandate PBB yang relevan dengan resolusi Dewan keamanan (UNSCR) dan Hukum Internasional. Operasi ini merupakan salah satu bentuk dukungan Uni Eropa terhadap PBB dalam kampanye mengupayakan keamanan maritim dan perlawanan terhadap perompakan melalui beberapa resolusi yang sudah dikeluarkan sebelumnya<sup>45</sup>.

Uni Eropa mulai melakukan banyak kebijakan operasi militer melalui CSDP sejak tahun 2003 di beberapa wilayah di dunia. Namun operasi Atalanta merupakan operasi angkatan laut Uni Eropa yang pertamakali diluncurkan. Selain itu, proses perumusan, perencanaan dan peluncuran dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan yang relatif singkat dibanding operasi CSDP lainnya. Dalam pelaksanaannya, operasi ini awalnya hanya dilakukan selama 1 tahun hingga Desember 2009, namun misi ini beberapa kali mengalami perpanjangan masa operasi hingga informasi terakhir yang terhimpun bahwa operasi Atalanta kembali mengalami perpanjangan mandat operasi dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Saat diluncurkan, EU Navfor pertama kali dipimpin oleh Inggris yang di dukung oleh Prancis dan Yunani serta

---

<sup>45</sup> [http://.Missions \\_ Eunavfor.html](http://.Missions _ Eunavfor.html)

pusat kendali operasi yang ditempatkan di Northwood United Kingdom<sup>46</sup>.

Gambaran mengenai operasi Atalanta yang dilaksanakan sejak tahun 2008-2014 di Teluk Aden sebagai sebuah pendekatan yang konferhensif untuk mengatasi perompak Somalia akan penulis deskripsikan terkait dalam hal mandat dan dasar hukum operasi, kontrol politik atau arah strategis serta struktur komando, dan bagaimana sebenarnya operasi Atalanta dilaksanakan secara langsung sebagai berikut :

a) Mandat Dan Dasar Hukum

Mandat Operasi Atalanta diberikan dari Joint Action 851 Dewan Uni Eropa yang didasarkan dari berbagai resolusi PBB. Dalam pelaksanaannya, Operasi Atalanta memiliki beberapa mandat, diantaranya :

- Melindungi pengiriman bantuan pangan terhadap kapal-kapal *World Food Programme* (WFP) untuk para pengungsi dan penduduk Somalia yang mengalami bencana kemanusiaan dan perlindungan terhadap pengiriman Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM).
- Pengamanan terhadap jalur pelayaran rentan di lepas pantai Somalia dan Teluk Aden.
- Pencegahan dan Penindakan terhadap aksi perompakan.
- Memantau kegiatan penangkapan ikan di lepas pantai Somalia
- Mendukung berbagai misi Uni Eropa dan Organisasi Internasional lainnya dalam upaya menjaga stabilitas keamanan maritime di Teluk Aden.

Dasar hukum yang Berkaitan dengan fokus PBB yang menangani perompak secara umum dan perompak Somalia

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

secara khusus dan sebagai bentuk perwujudan dalam pengamanan wilayah maritim, maka dari itu Operasi Atalanta memerlukan dasar hukum dalam pelaksanaannya. Ketentuan mengenai dasar hukum di dapatkan dari Keputusan oleh Dewan Uni Eropa sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) yang relevan seperti resolusi **1814, 1816, 1838, 1846, dan 1851** yang diadopsi sejak 2008 yang dijadikan acuan, serta Hukum Internasional yang berlaku. Dasar hukum tersebut dapat digunakan oleh Unit EU Navfor dalam melaksanakan misi, termasuk untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan juga upaya transfer orang yang terindikasi berniat atau yang berupaya melakukan tindakan perompakan bersenjata dilaut. Selain itu, segala aset dan property yang dimiliki para perompak dapat direbut dan diamankan oleh para unit operasi, begitupun dengan kapal-kapal yang ditahan oleh perompak. Bahkan pada tahun 2012 serangan langsung kedarat untuk menghancurkan barak-barak dan pos perompakan atau menahan perompak diperbolehkan sejauh radius 2 kilometer dari pantai.

Penangkapan dan penuntutan terhadap tersangka perompak dapat dilakukan dengan mekanisme hukum yang dimungkinkan. Uni Eropa sendiri membangun kerjasama dengan UNDP dan instansi terkait kejahatan transnasional berupa perompakan, terorisme, peredaran narkoba dan lain-lain. Saat ini transfer para tersangka untuk persidangan dari asset kapal EU NAVFOR ke Negara-negara Anggota atau Daerah negara-negara yang dapat mengadili berdasarkan undang-undang anti-bajak laut. Uni Eropa memberikan kontribusi keuangan terbesar untuk upaya Program kontra pembajakan. Program gabungan EU / UNODC yang mendukung pembangunan sistem peradilan Kenya, Seychelles dan Mauritius diluncurkan untuk memberikan bantuan praktis guna mengakomodir tambahan tuntutan terhadap tersangka perompak<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup>EU-Naval-Force-Operation-Atalanta-Information-Booklet-ENhyperlinks.pdf. Hal.15.



b) Kontrol Politik dan Arah Strategis

Dalam menjalankan operasi anti perompakan EU NAVFOR di Somalia, Uni Eropa membuat regulasi dan seperangkat aturan dalam proses perencanaannya. Kontrol politik mengenai operasi ini dilakukan oleh Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa (PSC) dibawah wewenang Dewan Uni Eropa dan Perwakilan Tinggi Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan atau Wakil Presiden Komisi Eropa. Komandan operasi (Op COMD) dari UE NAVFOR bertanggung jawab melaporkan langsung ke PSC<sup>48</sup>.

Dalam bidang pencegahan konflik dan manajemen krisis, Uni Eropa sendiri memiliki Komite Militer (EUMC) yang merupakan forum untuk konsultasi militer dan kerjasama antar negara-negara anggota Uni Eropa. Komite Militer ini dapat memberikan saran dan rekomendasi tentang masalah-masalah militer kepada PSC serta memonitor pelaksanaan operasi Atalanta. Ketua Komite Militer bertindak sebagai kontak utama untuk komandan operasi Atalanta.

**Gambar 3.2 : Kontrol Politik dan Struktur Komando EU Navfor.**



(Sumber: EU Navfor Information)

<sup>48</sup>*Ibid.* hal. 12.

Setelah disepakati bahwa kekuatan angkatan laut CSDP dalam Operasi anti perompakan EU Navfor disetujui, maka menjadi mungkin bagi Uni Eropa untuk mengambil langkah hukum untuk mendirikan operasi dan beralih pada arah strategis kebijakan militer dari proses perencanaan. Hal ini berlangsung pada tanggal 10 November 2008, ketika Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan dengan Dewan Urusan Umum yang sepakat untuk membentuk kerangka hukum untuk operasi Atalanta dengan mengadopsi Joint Action 2008/851/CFSP.

Berdasarkan rekomendasi yang telah adopsi dari MSO pada bulan September 2008 yang mengatakan bahwa kebijakan operasi militer anti perompakan di Teluk Aden dan Samudra Hindia (EU Navfor) didirikan dengan memiliki tiga tujuan utama. Yaitu mengenai prioritas perlindungan terhadap kapal-kapal dari WFP dalam memberikan bantuan pengiriman makanan kepada para pengungsi di Somalia. Selanjutnya adalah perlindungan pada jalur pelayaran rentan di lepas pantai Somalia, dan yang berkaitan tentang pencegahan serta penindakan tindakan perampokan bersenjata di lepas pantai Somalia dan Teluk Aden. Untuk memenuhi tujuan perencanaan arah strategis operasi, maka Komandan memperkirakan bahwa operasi akan membutuhkan setidaknya tiga kapal yang beroperasi setiap saat. Dimana satu diantaranya digunakan untuk mengawal konvoi WFP dan yang lainnya difungsikan untuk mengawal kapal-kapal komersial di Teluk Aden dan untuk surveilans dari daerah operasi, khususnya daerah nelayan yang penting. Fokus utama dari arah strategis operasi Atalanta untuk perlindungan pengiriman WFP juga diharapkan dapat memancing minat negara anggota-anggota Uni Eropa lain untuk terlibat di sekitar kawasan Tanduk Afrika yang telah menjadi terancam akibat aktivitas perompak Somalia.

c) Struktur Komando

Komando perintah EU Navfor didirikan sendiri dengan membuat saluran komunikasi antara Kantor Pusat Operasional dan Markas Besar Sekutu Maritime Command NATO di Northwood, London Inggris. Dengan Laksamana Philip Jones sebagai komandan pertama operasi. Dari markas komando di Northwood segala kegiatan operasi direncanakan dan dilaksanakan dalam hubungannya dengan otoritas politik dan militer dari Uni Eropa. Sedangkan komando angkatan laut Uni Eropa di jabat oleh Juan Garat Caramé (ES) dari markas (FHQ) di kapal SPS Numancia dari Spanyol dengan tugas mengontrol semua kekuatan militer di Area Operasi dari Markas Besar Angkatan (FHQ). Selain itu, komandan angkatan juga bertanggung jawab untuk perencanaan, orkestrasi dan pelaksanaan kegiatan militer taktis dan berkontribusi terhadap Perencanaan Operasional di OHQ<sup>49</sup>.

**3. Pelaksanaan Operasi EU Navfor**

a) Wilayah Operasi

Wilayah Operasi Atalanta terletak di koordinat batas barat 11°48 LU, 45° BT; 12°00 LU, 45° BT; batas timur 78° BT; batas selatan 10° LS; dan batas utara 26° LU meliputi Laut Merah, Teluk Aden dan sebagian besar Samudra Hindia, termasuk Seychelles, Mauritius dan Komoro. Area Operasi juga termasuk wilayah pesisir Somalia, serta perairan teritorial dan internal. Luas wilayah ini sekitar 2.000.000 mil laut persegi (sekitar 3.700.000 kilometer persegi) atau sekitar 1,5 kali ukuran daratan Eropa<sup>50</sup>. Perairan Teluk Aden dan lepas pantai Somalia mendapat sorotan khusus karena dianggap sebagai area bersiko tinggi terhadap ancaman perompakan. Dalam Daerah Operasi, unit EU Navfor melaksanakan misi sesuai dengan mandat prioritas untuk bekerjasama dengan WFP guna memastikan bahwa tidak ada kapal yang mengangkut

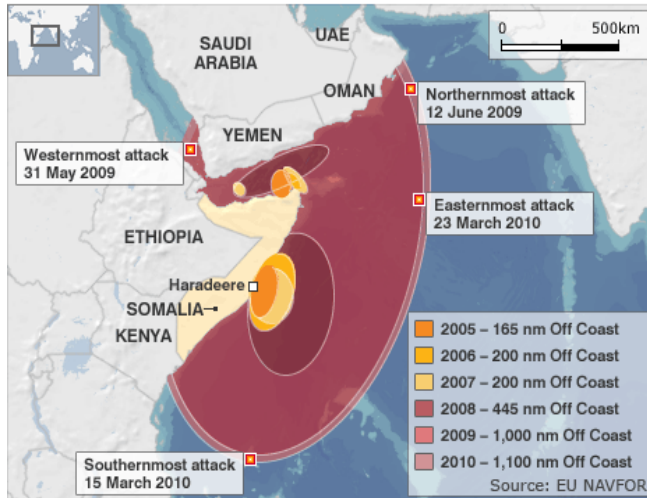
---

<sup>49</sup>Op.Cit. Eunavfor pdf.2012. Hal.3

<sup>50</sup>Op.Cit. Eunavfor .pdf.2012. Hal.4

bantuan kemanusiaan (logistik untuk misi AMISOM) akan melakukan perjalanan tanpa pengawalan di sepanjang garis pantai Somalia.

**Gambar 3.3 : Wilayah Ekspansi Perompakan Somalia**  
Expansion of pirate operations



(Sumber: Factsheet Eunavfor.2012)

Dalam menghadapi rentang geografis yang luas dan munculnya tren negatif perluasan serangan dari perompak, Atalanta mengadaptasi taktik kontra perompakan dengan terus mengkaji wilayah rentan dan memperluas wilayah operasi yang dimungkinkan dapat diakses oleh kapal perang. Kapal perang Atalanta juga melakukan patroli di sekitar wilayah Koridor Transit internasional yang direkomendasikan (IRTC) di Teluk Aden dan Samudera Hindia. Selanjutnya, kapal perang patroli maritim dan operasi Reconnaissance Aircraft (MPRA) melakukan pengintaian dan pengawasan via udara. Kapal perang secara rutin melakukan pemeriksaan visual atau fisik setiap kapal transit saat melakukan perjalanan melintasi Area beresiko tinggi terhadap ancaman perompakan. Setiap

kapal dagang yang ingin transit melalui Teluk Aden atau di lepas pantai Somalia disarankan untuk mendaftar terlebih dahulu di situs Maritim Security Center-Horn of Africa yang didirikan pada awal operasi untuk memfasilitasi koordinasi jalur lalu-lintas maritim. Langkah ini merupakan antisipasi untuk memungkinkan kapal yang melintas di area beresiko tinggi dapat tetap aman dengan dilakukannya pengawalan konvoi kapal oleh militer angkatan laut EU Navfor.

Dalam pelaksanaan operasi Atalanta, tim melakukan pertemuan dengan nelayan dan pelaut lokal guna memberikan pemahaman yang lebih baik dalam praktek kemaritiman dan pengentasan aktivitas perompakan. Para kapten atau awak kapal yang melewati wilayah beresiko tinggi terhadap aksi perompakan juga diberi pelatihan dan rekomendasi tentang praktek manajemen langkah-langkah perlindungan dan upaya menghindari perompakan kapal oleh *Best Manjemen Practice* (BMP). Sebuah tujuan yang signifikan dari Atalanta adalah pencegahan dan gangguan tindakan pembajakan dan perampokan bersenjata di laut lepas. Kapal perang menangkap tersangka perompak menyusul laporan intelijen aktivitas bajak laut atau penampakan oleh kapal pedagang dan MPRA<sup>51</sup>. Ketika aset Atalanta menemukan aktivitas dari kapal-kapal yang mencurigakan, berarti tindakan-tindakan yang diperlukan akan diambil dalam rangka untuk membuat kelompok yang diduga menjadi tidak mampu melakukan operasi perompakan lebih lanjut. Perompak diduga dapat ditahan dengan tujuan untuk mentransfer mereka kepada otoritas nasional yang kompeten untuk penuntutan dan peralatan mereka sering disita untuk tujuan alat bukti. Penyerangan dan penghancuran pasukan logistic dan perlengkapan juga dilakukan di wilayah darat pantai Somalia pada tahun 2012 sebagai bagian dari focus mengatasi maraknya aksi perompakan .

---

<sup>51</sup> Op.Cit. Eunavfor.htm.2014.

Selain itu, kapal perang operasi Atalanta secara aktif datang untuk memberikan bantuan pada kapal-kapal yang mengalami kendala dalam pelayaran, baik karena serangan perompak atau karena kapal tersebut dinyatakan dalam situasi darurat di laut. Aset Atalanta juga mendukung program pangan PBB dan Organisasi Pertanian (FAO) untuk memantau aktivitas pemancingan ilegal dan eksploitasi hasil laut di wilayah perairan Somalia. Hal yang lainnya adalah membantu evakuasi para pengungsi dan imigran di laut yang berusaha mencari suaka ke negara-negara Eropa.

#### b) Pendanaan Operasi

Pendanaan untuk operasional misi Atalanta memiliki jumlah yang bervariasi tiap tahunnya, namun angka tersebut relative tidak begitu kontradiktif dan cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, karna disebabkan oleh berbagai hal. Untuk penganggaran pada saat operasi Atalanta pertamakali diluncurkan sejak 2008 selama kurun waktu 12 bulan pertama diperlukan biaya sekitar € 8.300.000, setelah disepakati perpanjangan misi untuk 2 tahun berikutnya, yakni pada tahun 2009-2011, dana masing- masing yang dikeluarkan adalah senilai € 8.400.000 dan € 8.500.000. Sedangkan di tahun 2012 anggaran mencapai € 8.300.000. Sedangkan anggaran yang disediakan untuk perpanjangan mandat operasi dari 2012 hingga 2014 adalah € 14.900.000 yang relative lebih kecil dari dana pertahun yang dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk perpanjangan mandat yang dilakukan sejak 2014 sampai dengan Desember 2016, Uni Eropa kembali mengeluarkan biaya yang sedikit lebih rendah, dimana untuk tahun 2016 saja, biaya umum mandate yang dikeluarkan hanya € 6.300.000<sup>52</sup>.

Anggaran operasional ini disetujui dan diawasi oleh Komite Athena dari Negara-negara Anggota secara

---

<sup>52</sup>Hafid dwi prasetyo. Skripsi : “Operasi Atalanta Uni Eropa di Teluk Aden Dalam Menangani Perompak Somalia”. Hal. 5-6

tahunan. Anggaran dibagi melalui Mekanisme Athena antara negara anggota Uni Eropa berdasarkan GDP setiap negara dan mencakup pembiayaan biaya umum, seperti biaya untuk Kantor Pusat Operasional (Northwood-UK) dan Markas Besar Angkatan (Onboard Flagship). Biaya penyediaan aset militer dan personil juga dibagi oleh Negara yang berkontribusi sesuai dengan keterlibatan mereka dalam operasi, dengan masing-masing negara menanggung biaya sumber daya yang dikerahkan. Selain itu, ada anggaran khusus untuk menutupi biaya tambahan yang terkait dengan Operasi (seperti perjalanan atas nama Operation, biaya IT dan biaya komunikasi dan biaya evakuasi medis)<sup>53</sup>.

c) Kekuatan Militer Operasi Dan Negara Yang Berkontribusi

Komposisi pasukan dalam EU NAVFOR bersifat dinamis dan mengalami perubahan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan adanya rotasi unit yang sering dilakukan dan bervariasi sesuai dengan kondisi alam (musim hujan) di Samudera Hindia. Namun, kekuatan angkatan laut yang dioperasikan rata-rata sekitar 1.200 personil dengan menggunakan 4 sampai 7 kapal perang dan didukung oleh 2 hingga 3 pesawat MPRA yang mengawasi visualisasi udara di wilayah operasi. Disaat ini, negara-negara anggota Uni Eropa yang berkontribusi secara permanen dalam operasional dan dukungan peralatan militer untuk operasi diantaranya adalah Spanyol, Jerman, Prancis, Yunani, Italia dan Swedia. Belgia dan Belanda serta negara-negara ketiga seperti Norwegia, Montenegro, Serbia, dan Ukraina Juga mengirimkan sejumlah personil lapangan atau perwira staf militer untuk melengkapi tim di kantor pusat operasional di Northwood OHQ dan angkatan Markas (FHQ). Ukraina mulai memberikan kontribusi kapal perang pada awal tahun 2014,

---

<sup>53</sup>Op.Cit. Eunavfor .pdf.2012.Hal. 4

dan Selandia Baru memberikan kontribusi aset MPRA pada tahun yang sama<sup>54</sup>.

Partisipasi dalam operasi Atalanta yang dilakukan untuk mengatasi ancaman perompakan dilakukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa dan non anggota Uni Eropa. Dengan kata lain Negara yang dapat berkontribusi dapat melampaui negara anggota Uni Eropa. Norwegia merupakan contoh negara non anggota Uni Eropa yang pertamakali turut berpartisipasi dengan menyumbangkan satu kapal perang pada tahun 2009. Selain itu, ada beberapa negara lain seperti Kroasia dan Ukraina yang menyediakan perwira militer untuk diperbantukan sebagai staf di markas besar operasi (OHQ) di London. Tawaran bantuan lainnya datang dari Serbia dan Montenegro yang diterima dalam upaya partisipasi mengatasi perompakan di Teluk Aden melalui EU Navfor<sup>55</sup>.

Adanya bantuan dalam berbagai negara yang berkontribusi dalam upaya mengatasi perompakan Somalia tentu dapat memungkinkan meningkatnya kekuatan militer angkatan laut yang dapat dikerahkan dalam operasi Atalanta. Selain itu, dengan adanya kehadiran pasukan militer angkatan laut dari beberapa negara dan organisasi internasional yang berkepentingan di daerah yang rawan perompakan mampu memperkuat koordinasi dan kemampuan dalam mengatasi perompakan. Beberapa diantaranya seperti Pasukan gabungan maritim (CMF), Operasi CTF-115 oleh Amerika, NATO, dan berbagai Unit operasi pengentasan perompakan secara independen dari Cina, India, Jepang, Rusia, Taiwan, Malaysia, dan lain-lain yang berkomitmen terhadap perlawanan aksi perompakan Somalia dengan mandat dan misi masing-masing<sup>56</sup>. Operasi Atalanta memiliki hubungan kerjasama dan pengkoordinasian yang cukup kuat guna menghubungkan

---

<sup>54</sup> Op.Cit. Eunavfor.htm.2014. hal. 8.

<sup>55</sup> Op.Cit. Eunavfor.htm.2014. hal. 8.

<sup>56</sup> Op.Cit. Eunavfor.htm.2014. hal. 8.



berbagai unit pasukan yang melaksanakan misi operasi tersebut dalam ruang dan waktu di daerah operasi.

Adapun sarana kontribusi EU Navfor diantaranya berupa:

- Kapal Angkatan Laut (kapal tempur dan patroli, kapal-kapal pendukung sarana operasi, termasuk helikopter)
- Maritime Patrol dan Reconnaissance Aircraft (MPRA)
- Tim Perlindungan kapal Detasemen (VPD)
- Penyediaan anggota militer dan staf sipil untuk bekerja di OHQ di Northwood, Inggris Raya, atau di unit-unit kapal.

Adapun unit paten yang diturunkan dalam operasi Atalanta yang berlangsung sejak 2014 sampai berakhirnya mandat diakhir tahun 2016 adalah sebagai berikut :

#### I) Surface Vessels :

- i. ITS Virginio Fasan (F591) merupakan salah satu jenis kapal frigat kelas Fremm (European Multipurpose Frigate) dari seri pertama dalam konfigurasi perang anti-kapal selam. Kapal ini dibangun oleh Fincantieri di Riva Trigoso dan ditugaskan dalam angkatan laut Italia pada 19 desember 2013.
- ii. ESPN Rayo (P-42) atau dengan nama lain BAM adalah jenis kapal kedua kelas meteor. Kapal ini dibuat untuk menjalankan patroli operasional lepas pantai oleh angkatan laut Spanyol. BAM diandalkan dapat mendukung kinerja tinggi dalam pelaksanaan misi angkatan laut Spanyol dengan berat sekitar 2.860ton dan panjang 93,9 meter yang mampu mencapai kecepatan jelajah maksimal 20knot. Kapal

ini dikirim angkatan laut Spanyol untuk bertugas pada 26 Oktober 2011<sup>57</sup>

II) MPRAS :

- i. Pesawat Cisne P-3M dengan jenis Orion Phe3 Lockheed adalah pesawat anti kapal selam dan pesawat marfil turboprop bermesin empat. Selama bertahun-tahun, pesawat ini sudah mengalami perkembangan desain, terutama pada paket elektroniknya. Pesawat milik Angkatan udara Spanyol varian P-3M yang berbasis di Pangkalan Udara Morón, dekat Seville di Spanyol Selatan. Pesawat Ini telah dilengkapi dengan suite sensor yang diperbarui. Unit ini beroperasi mendukung visualisasi udara operasi Atalanta<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup><http://eunavfor.eu/deployed-units/surface-vessels/>.com.

<sup>58</sup>*Ibid.*